

Teknologi Laser dan Robotik Tingkatkan Kesembuhan Pasien Kanker Prostat

Teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan telah menjadi elemen krusial dalam pelayanan kesehatan urologi di tanah air saat ini.

JAKARTA(AM)-Perkembangan teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan telah menjadi elemen krusial dalam pelayanan kesehatan urologi di tanah air saat ini.

Spesialis Urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid mengungkapkan, teknologi seperti laser dalam penanganan pembesaran prostat jinak dan teknologi robotik dalam operasi pengangkatan kanker prostat akan memberikan hasil yang lebih baik.

“Teknologi laser memberikan manfaat signifikan, seperti minimnya pendarahan selama operasi dan pemakaian kateter yang lebih singkat, yang pada gilirannya mempersingkat waktu perawatan pasien,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (7/12).

Selain itu, menurut dia teknologi robotik dalam operasi pengangkatan kanker prostat menawarkan tingkat kehilangan darah yang lebih rendah, angka komplikasi yang lebih sedikit, pemulihan yang lebih cepat dan lama

rawat inap yang lebih singkat. “Tidak hanya itu, teknologi biopsi prostat robotik dengan panduan MRI telah membawa revolusi dalam deteksi dini dan akurat kanker prostat dengan penerapannya di lebih dari 20 rumah sakit di Jakarta,” bebarnya.

Rizal juga menjelaskan, kecerdasan buatan (AI) juga memainkan peran penting dalam Healthcare 5.0 dengan kemampuannya untuk melakukan analisis cepat dan akurat berdasarkan data pasien, membantu dokter membuat keputusan klinis yang lebih efisien dan personal.

“Dalam konteks ini, pentingnya pengembangan basis data kanker urologi untuk populasi Indonesia di era Healthcare 5.0 menjadi fokus utama. Kolaborasi antar tim multidisiplin (MDT) di

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) telah meningkatkan akurasi diagnosis, pengembangan teknik biopsi prostat robotik, dan standarisasi pemeriksaan MRI prostat,” bebarnya.

Selain itu, pemeriksaan genomik dan analisis sekuens gen juga menjadi perhatian utama dalam penanganan penyakit prostat, terutama kanker prostat, dengan peluang personalisasi perawatan dan pencegahan yang membuka lebar.

Ia menambahkan, yang tak kalah penting ialah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit prostat juga menjadi kunci dalam Healthcare 5.0.

Upaya dari Kementerian Kesehatan dan gerakan CER-

DIK telah membantu mengurangi keterlambatan dalam deteksi dan meningkatkan angka kesembuhan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan organisasi profesi, juga menjadi elemen penting dalam mengatasi stigma seputar kanker prostat.

“Melalui perkembangan teknologi mutakhir, kolaborasi multidisiplin, dan peningkatan kesadaran masyarakat, Indonesia bersiap untuk memberikan pelayanan kesehatan urologi yang lebih baik dan personal bagi setiap individu yang terkena penyakit prostat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap untuk terus berkontribusi dalam pengembangan global dalam teknologi kedokteran dan mencapai visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya. ● tom

SAMBUNGAN

“Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi-komunikasi,” ujar Tumpak.

Selain itu, dugaan pelanggaran etik yang dinyatakan cukup naik sidang adalah Firlil Bahuri diduga tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak hanya soal LHKPN, Dewas juga memutuskan untuk menaikan ke sidang etik soal tindakan Firlil menyewa rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Ada

yang berhubungan dengan penyewaan rumah di Kertanegara,” ujar Tumpak.

Patut Segera Ditahan

Selain perkara etik, Firlil juga tengah menghadapi proses pidana di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap SYL. Firlil Bahuri telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka sebanyak dua kali. Namun Firlil Bahuri belum ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK M. Jasin

sebelumnya mengatakan, penyidik Polri sudah tidak punya alasan buat tak menahan Firlil. Sebab dalam proses hukum yang dilakukan KPK dalam dugaan pemerasan, SYL ebagai pihak yang disebut diperas oleh Firlil sudah ditahan.

“Kok enggak ada equality treatment. Permasalahannya itu Syahrul sudah ditahan, dia (Firlil) yang memeras Syahrul juga harus ditahan segera,” kata Jasin dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi di

Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis (7/12).

Jasin menilai sudah tidak ada hal yang menghambat penyidik buat menahan Firlil Bahuri.

“Saya pikir sudah tidak ada tarik menarik. Ini kan sudah tersangka, tinggal menahan, kemudian diproses hukum, kemudian dilakukan pemberkasan ke Kejaksaan. Kalau KPK kan bisa sendiri pemberkasan,” ujar Jasin. “Ke Pengadilan Tipikor

DARI HAL 1

ini, kalau sudah diterima di pengadilan Tipikor pemberkasan itu tidak ada peluang untuk praperadilan gitu mestinya. Segera saja. Ini kan sudah diketahui umum proses hukum ini,” katanya.

Firlil Bahuri telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi kemudian menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomalango sebagai Ketua KPK Sementara. ● mar

Dewas KPK Putuskan Cukup Bukti...

baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan semuanya bisa, kan begitu,” kata Alex lebih lanjut.

Alex mengatakan, siapapun bisa mengurus dan mempengaruhi proses hukum yang bergulir di lembaga penegak hukum asalkan memiliki uang. Dalam kasus di lembaga pengadilan misalnya, seorang pengacara bisa memengaruhi hakim untuk mengondisikan suatu putusan.

“Inilah yang istilahnya mafia hukum atau apa, dan lain sebagainya, kan seperti itu memang kejadiannya,” ujar Alex.

Eks Wamenkumham Janjikan...

Proses hukum tidak saja ditentukan oleh aparat penegak hukum yang menangani suatu perkara. Penegakan hukum kadang juga dipengaruhi oleh orang yang tidak memiliki kewenangan atau berada di luar instansi terkait.

“Sepanjang itu tadi, ada harga, dan cocok, ya sudah terjadi lah di situ,” tutur Alex.

Adapun Helmut merupakan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), perusahaan tambang nikel yang tengah menghadapi sengketa kepemilikan perusahaan.

Helmut ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 22 Februari lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp 3 miliar,” ujar Alex.

Adapun kontak Helmut dengan Eddy dimulai ketika pengusaha itu mencari konsultasi hukum terkait AHU. Ia kemudian mendapat rekomendasi untuk menghubungi Eddy.

Pertemuan kemudian digelar di rumah dinas Eddy pada April 2022 yang dihadiri asisten pribadinya bernama Yogi Arie Rukmana dan pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi. Eddy lalu mengizinkan Yogi dan Yosi untuk menangani persoalan itu.

“Besaran fee yang disepakati untuk diberikan Helmut pada Eddy sejumlah sekitar Rp 4 miliar,” tutur Alex.

Dalam perkara ini, KPK menduga Eddy dan dua anak buahnya menerima suap dan gratifikasi dari Helmut sebe-

sar Rp 8 miliar. Sementara Rp 1 miliar lainnya diberikan Helmut kepada Eddy untuk keperluan pribadinya. Uang itu diduga digunakan Eddy untuk biaya pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK kemudian menetapkan Helmut sebagai tersangka dugaan pemberi suap. Sementara, Eddy, Yogi, dan Yosi sebagai tersangka dugaan penerima suap dan gratifikasi. KPK lalu menahan Helmut mulai malam ini hingga 20 hari ke depan. ● mar

Tim Hukum PDIP Cabut Laporan Polisi...

cabut laporan yang telah dilayangkankannya itu. Dia mengaku kini sepakat dengan pernyataan Rocky soal ‘bajingan’

dan ‘tolol’.

“Kurang lebih saya setuju lah yang disampaikan Rocky Gerung, itu poinnya,” ujarnya

saat dihubungi, Rabu (29/11) malam.

“Saya lihat Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat

sudah berubah. Berubah karena lama-lama saya lihat tidak seperti yang saya kenal. Jokowi yang dulu, yang betul-

betul kita perjuangkan mulai dari DKI, yang kita bawa dari DKI sampai dua periode jadi presiden,” katanya. ● mar

Bahlil Ungkap Nasib Perpanjangan...

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah memang berencana untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport. Sebab, produksi tambang tersebut akan mencapai puncaknya pada 2035.

“Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu 2035 itu puncaknya, begitu selesai 2035 itu akan menurun. Kalau tidak ada kepastian perpanjangan, maka tidak ada eksplorasi, berarti

tahun 2040 ini jadi barang mati,” kata Bahlil.

Terkait dengan penentuan operatorship, Bahlil mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembicaraan. Menurutnya, yang terpenting bukanlah pihak mana yang menjadi operator, tetapi penerapan laporan keuangan harus transparan.

“Yang penting adalah penerapan laporan keuangan dan transparansi, kan yang penting bagi kami ada penambahan nilai,

pendapatan negara dan bagaimana pengelolaan tambang bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) masih diproses.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa nantinya akan ada revisi peraturan pemerintah (PP).

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut PP nomor berapa yang akan direvisi sebagai bagian dari perpanjangan IUPK tersebut.

“Lagi proses, ada PP-nya masih diharmonisasi,” ungkap Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/12) pekan lalu.

Menurut Arifin, muatan revisi itu dilandaskan bahwa daerah pertambangan yang masih ada potensinya bisa

dikerjakan lebih lanjut dan di sisi lain juga memberikan tambahan manfaat untuk Pemerintah Indonesia.

“Ini kan case-nya untuk Freeport, nanti kita bisa refer ke yang lain kalau memang itu bisa memberikan manfaat tambahan untuk negara. Kan nanti bikin lagi tambahan smelter kemudian porsi pemerintah itu lebih besar dan kewajiban hilirisasi,” ujar Arifin. ● mar

Polisi Cari Kepala hingga Kaki...

Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan Sopian, Jumat (8/12).

Bagian tubuh yang ditemukan baru dari leher sampai dengkul. Itu pun kondisinya sudah menjadi kerangka atau tulang belulang.

“Iya sampai dengkul aja sampai badan ke bawah, sudah jadi kerangka,” ujarnya.

Polisi akan kembali mendatangi sumur tersebut untuk mencari bagian yang hilang. Pencarian sempat tertunda karena lokasi diguyur hujan.

“Pencarian bagian tubuhnya kemarin sempat tertunda karena hujan. Rencana mau dilakukan pencarian kembali setelah salat Jumat sama unsur desa di sekitar lokasi.

Kalau ditemukan, kita lakukan pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kematian mayat tersebut. Berdasarkan keterangan sementara keluarganya, pria itu sempat menghilang dari rumah sejak Januari 2023.

“Kalau menurut keterangan

si keluarganya itu tidak adanya dari sejak Januari sudah hampir setahun. Tapi kan kalau kita nggak pernah terima laporan orang hilang. Untuk memastikan sebab-sebabnya tentu kita harus mengetahui pemeriksaan forensik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Citeureup, Kabupaten

Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria dalam sumur pada Kamis 7 Desember 2023.

Adapun mayat itu ditemukan oleh warga yang sedang membersihkan sumur di area salah satu Sekolah Dasar (SD). Temuan tersebut langsung dilaporkan warga kepada Polsek Citeureup. ● lus

Heboh Pernikahan Sesama Jenis...

di Kampung Cimaladewa, Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur. Bahkan pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai wanita dan disaksikan oleh tokoh agama setempat.

Camat Sukaresmi, Latif Ridwan mengatakan, pernikahan tersebut berlangsung

pada tanggal 28 November 2023 lalu. Sebelumnya pihak keluarga bahkan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki.

“Namun tiga hari setelah melangsungkan pernikahan, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak gerik SY (23) selama berada di rumah,” ucap Latif,

Jumat (8/12).

Keluarga yang terus menanyakan akhirnya HH alias Ahdiyati (24), mengakui sendiri bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Sontak pihak keluarga perempuan merasa syok atas pengakuan HH itu. “Pihak keluargapun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemer-

intah setempat,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan keluarga, lanjut Latif, HH sebelumnya pernah diusir serta ditolak oleh pihak keluarga lantaran tidak memiliki identitas yang jelas. Namun setahun setelahnya, HH kembali lagi untuk melamar. “Karena tidak memiliki identitas yang jelas akhirnya keduanya dinikahkan secara siri. Bahkan

diketahui HH alias Hadi Ahdiyati merupakan warga asal Kalimantan Selatan, Banjarmasin,” ucapnya.

HH kini diamankan oleh pemerintah setempat terkait utang piutang yang dimilikinya. Sementara itu pihak keluarga saat didatangi tempat tinggalnya enggan untuk dimintai keterangan. ● osm

Kalangan Dokter Harap Fitofarmaka Segera Masuk Program JKN

JAKARTA(AM)-Fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang telah teruji klinis khasiat dan kemannya. Fitofarmaka sudah dikategorikan sebagai obat yang berasal dari bahan alam yang sudah teruji klinis sama khasiatnya dengan obat dari sintesa kimia.

Pemerintah sudah membuat Formularium Fitofarmaka, namun Fitofarmaka belum masuk Formularium Nasional Obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, banyak dokter belum dapat meresepkan untuk pasien JKN.

Lebih parah lagi, karena belum ada regulasi yang menetapkan Fitofarmaka setara dengan obat sintesa kimia, pihak asuransi kesehatan swasta pun belum dapat menerima klaim resep Fitofarmaka di rumah sakit, klinik maupun apotek, karena masih dianggap sebagai golongan obat tradisional.

Dokter sebenarnya ingin meresepkan fitofarmaka untuk pasien, tapi karena tidak dijamin sehingga menggunakan pengobatan yang lain,” ungkap Kepala Instalasi Farmasi RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr. apt. Rina Mutiara, belum lama ini.

Menurut Rina, saat ini bisa dibilang 90 persen pasien di rumah sakit pemerintah merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian dokter harus meresepkan obat yang terdapat di Formularium Nasional JKN. Sementara itu ketika obat tidak masuk Formularium Nasional, rumah sakit pun cenderung tidak memasukkannya ke Formularium Rumah Sakit.

“Jadi sebenarnya obat-obat fitofarmaka sudah mulai diresepkan dokter karena sudah diuji pada hewan dan manusia, tapi pada kenyataannya di rumah sakit belum banyak diresepkan oleh para klinisi atau dokter,” imbuh Rina.

Rina berharap fitofarmaka segera masuk Formularium Nasional meski saat ini Kemenkes telah meluncurkan Formularium Fitofarmaka. Namun, Formularium Fitofarmaka

belum mengakomodasi fitofarmaka untuk bisa diklaim dengan BPJS Kesehatan. “Pada saat penyusunan Fornas memang saat itu sudah ada usul juga dari RSCM, tapi belum diterima karena Kemenkes sudah membuat Formularium Fitofarmaka,” kata Rina.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) Dr. dr. Slamet Sudi Santoso mengungkapkan sulitnya fitofarmaka masuk JKN. Padahal, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah gencar memberikan edukasi ke para anggotanya untuk meresepkan fitofarmaka.

Kendala Fitofarmaka tidak masuk dalam Fornas Obat, Fitofarmaka juga masih ditolak asuransi kesehatan swasta, membuat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit juga belum mau membeli dan menyediakan Fitofarmaka dalam pelayanan JKN karena khawatir terkendala dalam proses klaim ke pihak BPJS maupun asuransi swasta.

Selain PDHMI, perhimpunan kedokteran lain seperti Perdosni, POGI, PEGI, PPHI, PGI, Peralmuni, dan PAPDI juga sudah pernah menyatakan dukungan untuk produk-produk Fitofarmaka dapat digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan formal di Indonesia. Yakni sistem JKN, demi membangun ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan nasional.

Kementerian Kesehatan sudah mengintegrasikan pengobatan konvensional dengan fitofarmaka. Hal itu diungkap Dirjen Farmalkes L. Rizka Andalia dalam forum tersebut.

Rizka yang juga Plt Kepala Badan POM tersebut mengungkapkan, sebanyak 80 persen penduduk dunia menggunakan pengobatan herbal. Oleh karena itu pemerintah mengguyakan kemandirian ketahanan kesehatan, salah satunya melalui obat bahan alam.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Prof. Laksuno Trisnantoro menyatakan, fitofarmaka saat ini tidak lagi digolongkan sebagai obat tradisional. Oleh karena itu, fitofarmaka setara dengan pengobatan modern. ● tom

Kemenkes Imbau Masyarakat Vaksinasi Covid-19 Selagi Gratis

JAKARTA(AM)-Covid-19 kini sudah bestatus endemi di Indonesia. Bahkan menurut Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunitas Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan kasus ini sudah terjadi sejak Juni 2023.

Artinya, kesehatan pada diri sendiri pun sudah menjadi tanggung jawab masing-masing individu untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Sedangkan pemerintah hanya mengimbau dan menyediakan kebutuhan masyarakat.

“Sejauh ini belum dibutuhkan pembatasan aktivitas, tapi pemerintah tidak akan berhenti untuk mengimbau dan menyediakan,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (7/12).

Terkait hal tersebut, pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga ventilasi udara indoor, dan menghindari asap rokok.

Pemerintah memberikan fasilitas layanan vaksinasi gratis kepada masyarakat baik itu imu-

nisasi rutin pada anak sebanyak 15 jenis, ataupun vaksinasi Covid-19.

“Lengkapi imunisasi rutin anak gratis dari pemerintah ada 15 jenis, vaksinasi Covid-19 dosis 1-4 segera lengkapi selagi ada dan gratis. Layanan antigen dan PCR gratis di seluruh puskesmas kecamatan di DKI Jakarta bagi yang bergejala atau kontak erat. Layanan pengobatan Covid-19 baik di puskesmas atau RS dengan BPJS,” ucap Ngabila.

Tidak hanya itu, menurut Ngabila siklus untuk terjadinya Covid-19 di Indonesia akan terjadi kenaikan setiap enam bulan. Meskipun demikian, masyarakat diminta tidak panik namun tetap waspada, terlebih saat musim pancaroba seperti ini.

Oleh karena itu, untuk kelompok rentan agar diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19. Karena jika positif akan berpotensi besar mengalami keparahan atau bahkan meninggal dunia. “Sama seperti batuk pilek biasa ketika pancaroba atau peralihan musim berpotensi naik. Kenapa? Karena faktor imunitas biasanya menurun karena kelelahan, stres, kurang tidur, dan makan tidak teratur, serta adanya faktor kuman karena kelembaban tinggi lebih mudah masuk ke tubuh manusia,” tuturnya. ● tom

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Bambang Suryo Sularso.
PENANGGUNG JAWAB: Prayan Purbia.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen), PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), BALIKPAPAN dan SAMARINDA (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), MAKASSAR dan MANADO (Jefri/Meike, Jemmy), TARAKAN KALTIM (Ali), BALI (Swasti), PEKANBARU (Bob), SURABAYA, MEDAN dan PONTIANAK.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Beni, Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500/eks (di luar kota Rp 3.000/eks), Harga Langganan Rp 50.000/7Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Tel : 021-6265566

Twitter: InternationalMedia @redaksi_IM